



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

SOLUSI DAN PENANGANAN MASALAH KEPESERTAAN PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL (P4S)

Sri Kusumastuti Rahayu

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Juli 2013

PERSEPSI/KOMENTAR SOAL KEBIJAKAN BLSM

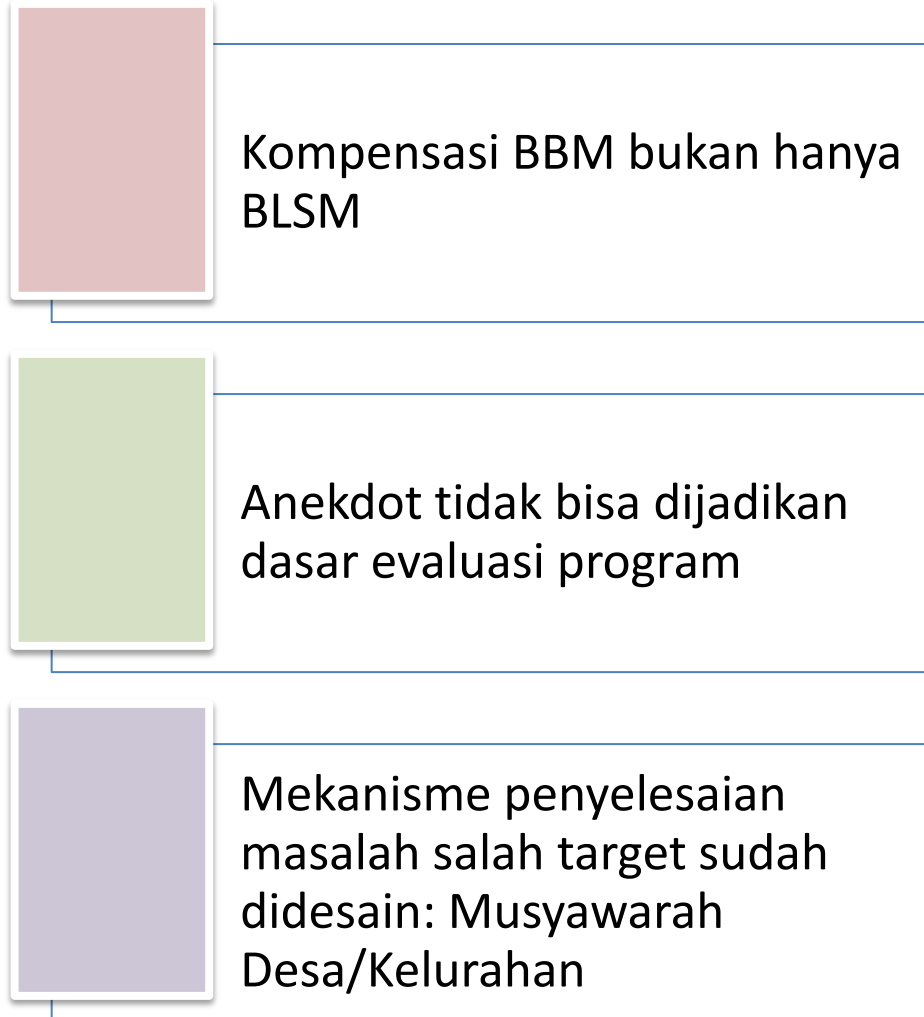
Kebijakan

- “BLSM menimbulkan ketergantungan”
- “Daripada BLSM lebih baik program padat karya atau bantuan kesehatan dan pendidikan”
- “BLSM tidak membantu beban masyarakat

Penyaluran

- “Pembagian BLSM kacau, data dipertanyakan”
- “Penyaluran BLSM ricuh”
- “Kantor pos diserang warga yang tak puas”
- “Warga antre BLSM sambil memainkan HP”
- “Warga berkalung emas ikut antre BLSM

TIGA PESAN UTAMA



KOMPENSASI KENAIKAN
HARGA BBM BUKAN HANYA
BLSM

PROGRAM-PROGRAM KOMPENSASI YANG DISIAPKAN

Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program Kompensasi Khusus

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Program Infrastruktur

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P3-SPAM)

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan infrastruktur Permukiman (P3-IP).

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P3-ISDA)

PROGRAM KOMPENASI DIBERIKAN DENGAN MEMBAGIKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)



→ KPS merupakan penanda rumah tangga miskin dan rentan sebanyak 15,5 juta rumah tangga.

ANEKDOT BUKAN
KESIMPULAN: PROSES
PENARGETAN BLSM

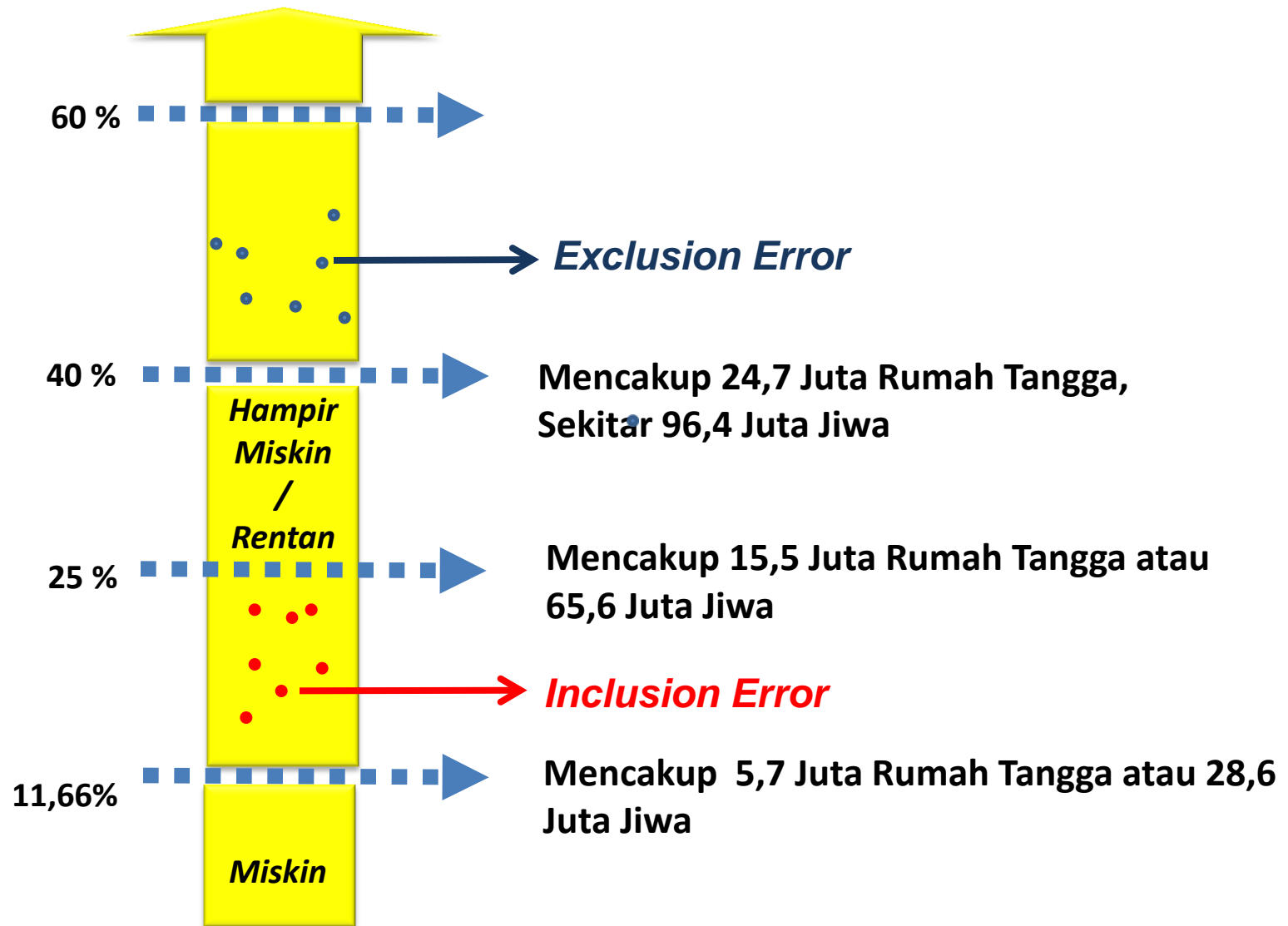
SUMBER DATA PENERIMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)

- Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K adalah sumber data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang digunakan untuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
- Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang terakhir adalah PPLS pada tahun 2011 → dengan metodologi pendataan PPLS 2011 yang telah disempurnakan bersama BPS dan TNP2K untuk meningkatkan akurasi data
- Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN SASARAN DAN PERSEPSI ATAS KETEPATAN SASARAN

1. Hanya diberikan pada Rumah Tangga di 25% terbawah secara status sosial ekonomi
2. Karakteristik penduduk di kelompok berpendapatan rendah hampir sama
3. Penentuan siapa yang menjadi penerima KPS tidak didasarkan hanya pada satu indikator, tapi beberapa, dan tidak selalu kasat mata
4. Ada dinamika status sosial ekonomi antra 2011-2013
5. Kesalahan pengumpulan data

1. KPS DIBERIKAN PADA PENDUDUK DI 25% TERBAWAH



PENGELUARAN RATA-RATA PADA PERCENTILES 25

Propinsi	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Jumlah Anggota RT	Pengeluaran Rata-Rata Rp/Perkapita/Bulan	Pengeluaran RT/bulan	Upah Minimum Tahun 2012
Aceh	356,720	4.9	407,654	2,007,231	
Sumatera Utara	746,220	5.1	327,238	1,658,148	1,200,000
Sumatera Barat	275,431	4.8	384,033	1,856,727	1,150,000
Riau	227,656	5.8	420,964	2,432,675	1,238,000
Jambi	162,779	4.7	369,108	1,732,017	1,142,500
Sumatera Selatan	419,579	4.3	306,891	1,327,721	1,195,220
Bengkulu	121,574	4.3	321,077	1,394,543	930,000
Lampung	573,954	4.1	323,567	1,340,797	
Bangka Belitung	41,635	5.8	421,876	2,462,022	1,110,000
Kepulauan Riau	64,732	4.8	468,218	2,251,389	
DKI Jakarta	226,462	3.4	502,335	1,721,472	1,529,150

2. PENENTUAN BERDASARKAN BANYAK INDIKATOR

Kelompok kriteria	Detail kriteria	Deskripsi pilihan pada kriteria
Karakteristik rumah tangga	Status kepala rumah tangga Jumlah anggota rumah tangga Jumlah anggota rumah tangga usia produktif Jumlah anak bersekolah	Kepala rumah tangga tunggal/menikah Lebih banyak/sedikit Lebih banyak/sedikit Lebih banyak/sedikit
Kondisi sosial ekonomi	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga Tingkat pendidikan anggota rumah tangga Status pada pekerjaan utama	Pendidikan dasar, menengah, tinggi Pendidikan dasar, menengah, tinggi Berusaha sendiri, buruh, karyawan
Keadaan rumah tinggal	Status kepemilikan rumah Dinding Atap Lantai Sumber penerangan/listrik Bahan bakar untuk memasak Sumber air minum Cara memperoleh air minum Pemakaian fasilitas tempat buang air/toilet Tempat buang air	Milik sendiri/keluarga/sewa Bahan/kondisi Bahan/kondisi Bahan/kondisi PLN/non-PLN; daya terpasang Listrik/gas/minyak tanah/arang Air kemasan/isi ulang/leding/sumur/ terlindungi-tidak terlindungi Beli/tidak membeli Bersama/milik sendiri Tangki/lubang tanah/kolam/sungai/lapangan
Kepemilikan aset	Kulkas Tabung gas 12 kilogram Telepon seluler Kendaraan	Memiliki/tidak memiliki Memiliki/tidak memiliki Memiliki/tidak memiliki Sepeda/perahu/sepeda motor/perahu motor/mobil/kapal bermotor

?

RUMAH TANGGA MANA YANG LEBIH BERHAK MENERIMA KPS?



Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, dan memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.

3. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA YANG MIRIP: PERBANDINGAN ASET TIAP 10 RUMAH TANGGA

Kelompok kriteria	Detail kriteria	Jakarta Utara		Muko Muko		Rata-rata Nasional	
		Penerima KPS	Rentan Non-KPS	Penerima KPS	Rentan Non-KPS	Penerima KPS	Rentan Non-KPS
Karakteristik rumah tangga	Status Ka RT: Menikah	8	7	8	8	8	7
	Status Ka RT: Tunggal perempuan	2	2	1	2	1	2
Kondisi sosial ekonomi	Tingkat pendidikan Ka RT: SD	4	3	4	3	4	4
	Tingkat pendidikan Ka RT: SMA	2	3	0	1	1	1
Keadaan rumah tinggal	Status kepemilikan rumah: Milik sendiri	4	5	8	9	8	8
	Dinding terluas adalah tembok	6	8	1	2	4	6
	Lantai terluas bukan tanah	8	8	7	8	6	8
Kepemilikan aset	Telepon seluler	7	7	7	8	5	6
	Kendaraan: sepeda motor	1	3	4	6	2	4

*) dibaca sebagai rata-rata, bukan kondisi tiap 10 kepala rumah tangga

4. DINAMIKA STATUS SOSIAL EKONOMI DALAM MASYARAKAT



1. Antara 2011-2013 penduduk yang tadinya “layak” bisa saja mengalami keanaikan pendapatan, memperbaiki rumah dll
2. Di sisi lain, jumlah BLSM 2013 juga lebih kecil dibandingkan BLT 2008 dan Raskin 2012.

5. KESALAHAN (ERROR) DALAM PENCACAHAN

- Tidak ada data yang sempurna, kesalahan dalam pengumpulan data mungkin saja terjadi
- Sudah diminimalkan dengan melakukan “konsultasi dengan penduduk miskin” ketika mengumpulkan data
 - Petugas bertanya kepada responden penduduk miskin, apakah ada tetangga sesama penduduk miskin yang perlu didata
 - Lebih baik dibanding mengandalkan informasi dari elit lokal (“elite capture”)
- Mekanisme koreksi sudah disiapkan: musyawarah desa/kelurahan

MASALAH KETEPATAN SASARAN & SOLUSINYA

MEKANISME PENGGANTIAN RUMAH TANGGA PENERIMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

- Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat (DPM)
- Musyawarah desa/kelurahan atau musyawarah kecamatan dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan lokal mengenai kepesertaan, yang bertujuan untuk mengganti rumah tangga.

CONTOH RTS YANG KELUAR DARI DPM RASKIN 2013 SECARA SUKARELA DAN TIDAK MENERIMA KPS (1)



SUMBER: KELURAHAN SEI PELENGGUT, KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM, 4 JULI 2013

CONTOH RTS PENGGANTI (1): RUMAH TAMPAK BAGUS, TETAPI PENGHUNI LANSIA JANDA BERSAMA CUCU; ANAKNYA JANDA BEKERJA DI SINGAPURA

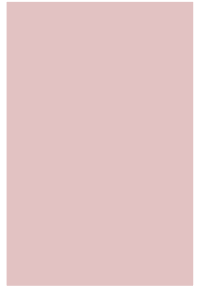


CONTOH RTS PENGGANTI (2)

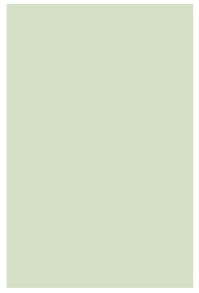


SUMBER: KELURAHAN SEI PELENGGUT, KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM, 4 JULI 2013

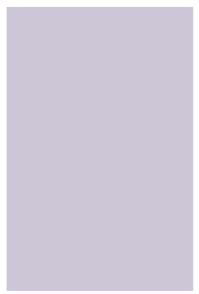
LAGI, TIGA PESAN UTAMA



Kompensasi BBM bukan hanya BLSM



Anekdote tidak bisa dijadikan dasar evaluasi program



Mekanisme penyelesaian masalah salah target sudah didesain: Musyawarah Desa/Kelurahan

TERIMA KASIH